

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta kemakmuran bagi seluruh rakyat. Maka pemekaran wilayah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali sehingga dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan dengan tujuan untuk mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa atau kata lain meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang di mekarkan.

Pembentukan suatu daerah dalam struktur Negara Indonesia pada dasarnya sebagai subsistem yang di maksud demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya di tujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta meminimalkan masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat setempat.<sup>1</sup> Hal ini yang menjadikan pemekaran wilayah sebagai konsep otonomi daerah yang menekankan pada aspek pelayanan pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, dan juga sebagai dasar pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

---

<sup>1</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Malang : CV. Cita Intrans Laras Wisma Kalimetro, 2016), hlm 7

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sebelum adanya pemekaran di Desa Bati Kilwouw. Dari segi sosial, kehidupan masyarakat setempat hanya bergantung pada alam, masyarakat lebih banyak memfokuskan diri untuk bercocok tanam baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jang panjang. Interaksi sosial masyarakat hanya berada pada lingkungan hidup atau kerabat dan sanak saudara, walaupun mereka memiliki keterbatasan pada ruang interaksi sosial, tingkat solidaritas atau dikenal sebagai sifat gotong royong masi terlihat koko, saling membantu dan saling melengkapi masi terjaga dengan baik. Sedangkan dari sisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarkat terlihat sangat renda di sebabkan karena jarak antara masyarakat dengan pusat pemerintahn sangat jauh. Selain itu, dalam hal transaksi jual beli masyarakat sering kali menggunakan barter untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari fenomena-fenomena sosial yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Administratif Bati Kilwouw diatas menjadi salah satu alasan yang sangat mendasar

---

<sup>2</sup> Josep Riwokaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers,2011), hlm 43

untuk memisahkan diri atau dengan kata lain ingin mengurus atau mengelola negerinya sendiri dari desa induk dengan tata cara atau proses pemekaran wilayah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Untuk menjadi desa administratif menurut ketentuan perundang-undangan. Desa Administratif Bati Kilwou terdiri dari beberapa Dusun diantaranya adalah Dusun Sayei, Dusun Arweul dan Dusun Tokunakat. Diantara tiga Dusun yang ada memiliki kesamaan serta keinginan yang sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan taraf hidupnya seperti masyarakat lain pada umumnya.

Adapun proses pembentukan desa ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu, pertama tahapan persiapan dengan cara meningkatkan status dusun menjadi desa administratif persiapan dari desa induk selama kurang lebih satu sampai tiga tahun sejak tahun 2007 sampai tahun 2010. Kedua setelah tahapan pertama selanjutnya ada tahapan evaluasi dengan mempertimbangan kesepakatan masyarakat diantaranya adalah asal usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi desa dalam hal untuk di memekaran menjadi desa administratif.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan bersama masyarakat di beberapa dusun diantara Dusun Bati Sayei, Dusun Bati Arweul dan Dusun Bati Tokunakat. Maka, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Walang Tengah di Negeri Danama dan Negeri Administratif Bati Kilwouw di Negeri Kilmoy Pasal 4 bahwa dengan terbentuknya Negeri

Administratif Walang Tenga di Negeri Danama dan Negeri Administratif Bati Kilwouw di Negeri Kilmoy Kecamatan Tutuk Tolu tersebut sebagai dimaksud pada Pasal 2 maka wilayah kerja Negeri Danama dan Kilmoy di kurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan daerah ini.<sup>3</sup>

Sebagai alasan masyarakat di tiga dusun yang dimaksudkan diatas yang tergabung dalam Desa Administratif Bati Kilwou yang telah di mekarkan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis di Desa Administratif Bati Kilwouw, penulis menemukan bahwa :

Setelah dimekarkan menjadi desa Administratif Bati Kilwouw, pelayanan kepada masyarakat desa jelas mengalami perubahan, contohnya dalam pengurusan administrasi termasuk pengurusan surat keterangan akte kelahiran, kartu tanda penduduk, dll. Pengurusan tidak antri dan langsung kami layani. Jadi tidak memakan waktu lama dan jarak ke kantor desa semakin dekat di banding sebelum pemekaran.<sup>4</sup>

Hal lain juga yang disampaikan salah satu anggota masyarakat di Desa Administratif Bati Kilwouw Bahwa :

Setelah pemekaran, masyarakat sering berbeda pendapat (aduh mulut), ada kecemburuan sosial diantara satu dengan yang lain, padahal sebelum

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Negeri Administratif Walang Tengah di Negeri Danama dan Negeri Administratif Bati Kilwouw di Negeri Kilmoy Kecamatan Tutuk Tolu

<sup>4</sup> Hasil Observasi Sementara pada bulan juli 2021

pemekaran mereka hidup rukun dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun hal lain yang di sampaikan oleh salah satu anggota masyarakat bahwa :

Setelah pemekaran, saya melihat ada peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebun mendapatkan hasil dari apa yang mereka tanam, karena ada perputaran uang. Bila di dibandingkan dengan sebelum pemekaran, masyarakat lebih sering memberi atau menukar barang dengan barang lain sebagai alat jual beli.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : ***“Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Desa Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur”***.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin membatasi lingkup permasalahan dengan merumuskan masalah yang di kemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap perubahan sosial ekonomi pada masyarakat di Desa Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur .?
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap terhadap perubahan sosial ekonomi pada masyarakat di Desa Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi peneliti jurusan sosiologi agama yang berkaitan dengan dampak pemekaran wilayah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Administratif Bati Kilwouw.

##### **b. Secara Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam melaksanakan , mengelola sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat.

#### **E. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam pemahaman proposal ini. Maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

Dampak Adalah akibat atau imbas yang terjadi baik itu negatif atau positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang

melakukan kegiatan tertentu.<sup>5</sup> Pemekaran berasal dari kata “MEKAR” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak<sup>6</sup> Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Jadi pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah atau daerah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.<sup>7</sup> Perubahan sosial merupakan suatu alat pengukur prestasi dari suatu perkembangan perekonomian.<sup>8</sup> Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian.<sup>9</sup> Desa administratif adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang akan di tuangkan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan garis-garis besar penyusunan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) Tersedia Di <http://Kbbi.Web.Id/Artikata/Analisis.html> di Akses Pada Sabtu 23 : 13.00 WIT

<sup>6</sup> Murniati. *Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten Kerinci*. J.mas vol 2 No 1. 2017

<sup>7</sup> Ibid J.mas vol 2 No 1. 2017

<sup>8</sup> Sukirno, S. *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 423.

<sup>9</sup> Mankiw, N.G. *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm 174

<sup>10</sup> Agusniar, A, “*Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Singkil*” (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Pertanian, Bogor, 2006).

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, pengertian judul serta sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan tentang landasan teori tentang pemekaran wilayah, meliputi tiga bagian yaitu, pengertian pemekaran wilayah, tujuan pemekaran serta dampak pemekaran wilayah dan yang ke dua perubahan sosial ekonomi,

Bab ketiga menjelaskan tentang tipe penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

